

**AKAD NIKAH YANG TERJADI SECARA BERSAMAAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Margorejo, Kotabumi Utara, Lampung Utara)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat dan Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah.

Oleh:  
**ADELLA PUTRI**  
**NPM: 1621010117**

**Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**AKAD NIKAH YANG TERJADI SECARA BERSAMAAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Margorejo, Kotabumi Utara, Lampung Utara)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat dan Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah.

**Oleh**

ADELLA PUTRI

NPM: 1621010117

Program Studi : Ahwal Asy-Syakhsiyah

Pembimbing I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., MM  
Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020 M**



## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus yang terjadi di Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. Kasus ini bermula adanya seorang laki-laki yang harus menikahi kedua perempuan sekaligus dalam satu hari karena salah satu dari perempuan tersebut meminta pertanggung jawaban kehamilan perempuan dengan laki-laki itu. Dengan demikian rumusan masalah bagaimana proses akad nikah yang terjadi secara bersamaan dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang akad nikah yang terjadi secara bersamaan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses penyebab adanya akad nikah yang terjadi secara bersamaan dan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai akad nikah secara bersamaan. Penelitian ini berjenis lapangan (*field research*) dan bersifat *deskriptif analitis*, berdasarkan jenis sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data yang digunakan adalah pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*) melalui beberapa narasumber yaitu tokoh agama, tokoh adat, aparat desa dan saudaranya. Adapun untuk pengelolaan data adalah induktif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menarik dari fakta khusus kemudian menjadi umum, analisis data adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah yang terjadi secara bersamaan melalui proses sebagai berikut sebelum terjadinya akad nikah seorang laki-laki yang berniat untuk menikahi wanita pertama dengan adanya proses adat *seimbangan* yang biasa dilakukan oleh suku Lampung melalui *tengepik*, *pengunduran senjata*, *bebalah*, *manjau mengiyan dan sujut*, *peggadew rasan dan cuak mengan* tetapi karena datang wanita kedua tersebut yang meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya kepada laki-laki tersebut, melalui permusyawaratan yang dilakukan dengan tokoh adat akhirnya wanita pertama merelakan dirinya untuk dimadu, maka pada saat akad nikah tersebut yang pertama seorang laki-laki tersebut menikahi wanita pertama (yang rela untuk dipoligami) dan akad nikah kedua dilaksanakan dengan wanita kedua (yang telah meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya). Berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwa pernikahan mereka bahwa Perspektif hukum Islam akad nikah yang terjadi secara bersamaan memiliki dua hukum, yaitu jika melihat dari surat An-Nisaa ayat 3 “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat” itu diperbolehkan seorang laki-laki menikahi wanita dua sekaligus secara bersamaan dan sah untuk wanita yang pertama, namun hukum akad nikah yang kedua menjadi haram karena pernikahan yang dilakukan secara sirri itu tidak tercatat di KUA dan itu dapat berdampak buruk bagi keturunannya.

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adella Putri  
NIM : 1621010117  
Jurusan/Prodi : Ahwal Asy-Syaksiyah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Akad Nikah yang Terjadi Secara Bersamaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, Juli 2020  
Penulis,

Adella Putri  
NPM. 1621010117





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Nama** : Adella Putri  
**NPM** : 1621010117  
**Jurusan** : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyah)  
**Fakultas** : Syari'ah  
**Judul Skripsi** : **AKAD NIKAH YANG TERJADI SECARA BERSAMAAN**  
**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di**  
**Desa Margorejo, Kotabumi Utara, Lampung Utara)**

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munakaqsyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M**  
**NIP. 195703051978031001**

**Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A**  
**NIP. 198206262009011015**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**  
**NIP. 197409202003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“AKAD NIKAH YANG TERJADI SECARA BERSAMAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Margorejo, Kotabumi Utara, Lampung Utara)”** disusun oleh: **Adella Putri**,  
NPM: **1621010117**, Program Studi: **Al-Ahwal Asy-Syakhsyah**, telah diujikan  
dalam Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal  
Selasa, 28 Juli 2020:

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua Sidang**

: **Yufi Wiyos Rini M, S.Ag., M.Si**

(.....)

**Sekretaris**

: **Hasanuddin Muhammad, M.H**

(.....)

**Penguji Utama**

: **Dr. H. Khoirul Abror, M.H**

(.....)

**Penguji Pendamping I**

: **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M**

(.....)

**Penguji Pendamping II**

: **Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A**

(.....)

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Khoiruddin, M.H**

**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat  
kebesaran Allah.*

(Q.S Az-Zariyat (51) ayat : (49)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta : CV. Penerbit J-Art), h. 522.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur atas berlimpah nya berkah Allah SWT yang telah memberikan Rahmat-Nya dan ungkapan terimakasih saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah tercinta Bapak H. Dirhansyah dan Alm. Ibunda Tercinta Tum Nawati serta wali yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya untuk dapat menyelesaikan Skripsi dan selalu mendoakan untuk keberhasilan saya kedepannya.
2. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.



## **RIWAYAT HIDUP**

Adella Putri, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 Maret 1997, anak ke lima dari enam bersaudara dari Ayah yang bernama Dirhansyah dan Ibu Tumnawati (Alm). Pendidikan yang pernah ditempuh adalah di TK Al-fajar Bandar Lampung lulus pada tahun 2003 , MIN Sukarame Bandar Lampung lulus pada tahun 2009, MTs Negeri 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2012, SMK Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada tahun 2015 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016.

Bandar lampung, Juli 2020  
Penulis,

Adella Putri  
NPM.1621010117

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji syukur kehadiran Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan serta nikmat kesehatan yang tidak terhitung jumlahnya. Shalawat serta salam yang tidak terkira selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan yang lurus dan jalan yang penuh dengan keridhaan Allah SWT, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “AKAD NIKAH YANG TERJADI SECARA BERSAMAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Margorejo, Kotabumi Utara, Lampung Utara)”.

Penulisan Skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuannya dari berbagai pihak yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khoiruddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Rohmat S.Ag,M.H.I. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A. Selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H,MM. Selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A. Selaku pembimbing II dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan
6. Dewan Penguji : Ibu Yufi Wiyos Rini M, S.Ag.,M.Si. Selaku Ketua Sidang, Bapak Hasanuddin Muhammad,M.H. Selaku Sekretaris Sidang, Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. Selaku Penguji I, Bapak Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M. Selaku Penguji II, dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A. Selaku Penguji III. Yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.



7. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan
8. Ayah tercinta dan Keluarga besar saya, serta sahabat-sahabat saya terimakasih atas do'a dan dukungannya. Semoga Allah senantiasa membalas dan memberikan keberkahan kepada kita semua
9. Kepada sahabat-sahabat yang selalu menemani saya dalam proses penulisan skripsi ini (Mirza Rohike S.Sos dan Sarah Halimah S.Sos).
10. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat Universitas yang telah memberikan informasi, data, refensi, dan lain-lain
11. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2016 serta adik-adik hukum keluarga khususnya
12. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang baik yang ku kenal semasa hidupku.

Saya juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan keterbatasan kemampuan saya. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi upaya menyempurnakan tulisan ini kedepannya. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis ini (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, Juli 2020  
Penulis,

Adella Putri  
NPM.1621010117

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
G. Manfaat Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian.....	8
 <b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Perkawinan dalam Islam.....	12
1. Pengertian Akad Perkawinan .....	12
2. Tujuan Perkawinan.....	15
3. Rukun dan Syarat Akad Perkawinan .....	20
4. Dasar Hukum Perkawinan .....	32
5. Hikmah Melakukan Perkawinan .....	38
6. Larangan Perkawinan .....	41

B. Poligami dalam Perkawinan Islam.....	44
1. Pengertian Poligami.....	44
2. Dasar Hukum Poligami.....	46
3. Alasan dan Syarat Poligami.....	48
4. Hikmah Poligami.....	53
C. Perkawinan yang Tidak Tercatat.....	54
1. Pengertian Perkawinan Tidak Tercatat .....	54
2. Mudarat Nikah Tidak Tercatat .....	56
3. Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Sirri .....	58
D. Hukum Perkawinan pada Adat Lampung.....	59
E. Tinjauan Pustaka .....	63

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara .....	64
1. Sejarah Desa Margorejo.....	64
2. Letak Geografis Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.....	67
3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.....	68
4. Kondisi Sosial Budaya Desa Margorejo.....	69
5. Kondisi Saran dan Prasarana.....	70
6. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Desa Margorejo.....	72
B. Praktik Akad Nikah yang Terjadi Secara Bersamaan di Desa Margorejo .....	75
C. Faktor Penyebab Akad Nikah Secara yang Terjadi Bersamaan di Desa Margorejo .....	80

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Akad Nikah yang terjadi secara bersamaan.....	81
B. Perspektif hukum Islam tentang adanya akad nikah yang terjadi secara bersamaan.....	83

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Rekomendasi.....	88

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Turnitin
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Dokumen Pendukung (Foto)
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 SK Pembimbing
- Lampiran 6 Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian



## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Sejarah Kepemimpinan Desa Margorejo Dari Awal Berdirinya Desa Hingga Sekarang .....	53
2. Daftar Sumber Tata Guna Tanah Desa Margorejo .....	53
3. Daftar Sumber Jumlah Penduduk Desa Margorejo.....	54
4. Daftar Sumber Mata Pencarian Penduduk Desa Margorejo .....	55
5. Daftar Sumber Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Margorejo .....	55
6. Daftar Sumber Pendidikan Formal Desa Margorejo.....	56
7. Daftar Sumber Prasarana Kesehatan Masyarakat Desa Margorejo .....	57
8. Daftar Sumber Tenaga Kesehatan Masyarakat Desa Margorejo .....	57
9. Daftar Sumber Sarana Prasarana Ibadah Desa Margorejo.....	57



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Proses Akad Nikah yang Terjadi Secara Bersamaan .....	62
---	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Demi memudahkan skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu di uraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Akad Nikah yang Terjadi Secara Bersamaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara-Lampung Utara)”.

Adapun Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Akad pernikahan secara bahasa akad nikah terdiri dari dua kata, akad dan nikah. Akad adalah perikatan perjanjian, dan permufakatan (Al-ittifaq).<sup>1</sup> Akad nikah juga dikatakn dengan istilah ijab kabul. Ijab adalah pernyataan melakukan ikatan (dilakukan oleh wali mempelai wanita atau wakilnya), sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan ikatan (dilakukan oleh pihak mempelai pria atau yang mewakilinya). Dengan demikian pengertian akad nikah atau ijab kabul adalah persetujuan dengan saling ridho dari kedua belah pihak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.

Secara Bersamaan yakni dapat di samakan dengan Simultan yaitu sesuatu yang terjadi atau dilakukan pada waktu yang sama dan tidak saling menunggu.<sup>2</sup> Dapat di katakan sama dengan Simultan karena arti tidak jauh beda dengan judul ini yang pada dasarnya akad nikah tersebut dilakukan bebarengan dalam satu waktu di dalam satu resepsi yang sama.

---

<sup>1</sup>Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung : CV. TeamMsBarokah 2015), h.34.

<sup>2</sup>Aso Sentana,,*Kamus Bahasa Indonesia*, , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2006), h. 5.

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>3</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian dari beberapa istilah diatas, bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengungkap faktor apa yang menyebabkan terjadinya Akad Nikah yang Bersamaan dan untuk mengetahui bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap Akad Nikah yang terjadi Secara Bersamaan.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul Akad Nikah yang Terjadi Secara Bersamaan dalam Perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif, permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan adanya seorang laki-laki yang menikahkan dua orang wanita sekaligus secara bersamaan dalam satu akad di dalam satu resepsi pernikahan yang ada di Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara-Lampung Utara. Karena dimungkinkan sebagian masyarakat belum mengetahui hukum tentang adanya akad yang terjadi secara bersamaan dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>3</sup>Martono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2010), h. 276.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.



## 2. Secara Subjektif

- a. Judul dari skripsi ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang dipelajari di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Permasalahan adanya akad yang terjadi secara bersamaan ini jarang terjadi.

## C. Latar Belakang Masalah

Islam Memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai isterinya.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah yakni hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan demikian ini merupakan naluri manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Allah telah memilih dengan cara perkawinan manusia dapat melangsungkan keturunannya sehingga dapat melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan melakukan peranannya secara alamiah dan positif.

Firman Allah SWT. Q.S Al Hujarat (49): Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Hai manusia sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa

<sup>5</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama. Semarang, Cit. I, 1993, h. 130

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling mulia diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>6</sup>

Untuk menyalurkan naluri manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan bertata krama, sehingga kedepan manusia itu mempunyai jalur kekerabatan yang konkrit serta benar, maka diadakan suatu tata aturan atau hukum. Tata aturan dan hukum dalam perkawinan yang terdapat menurut Islam dengan agama non Islam, bahkan perkawinan makhluk selain manusia. Demikian betapa agungnya Islam mengkemas aturan perkawinan yang menjadikan keharusan bagi setiap pasangan yang akan menjalin hidup berkeluarga, bukan saja sebagai sarana untuk melangsungkan nalurnya sebagai manusia yang senantiasa menginginkan adanya kelangsungan hidup untuk mengembang lanjutkan keturunannya. Lebih dari itu juga perkawinan dalam Islam senantiasa mempertimbangkan kesucian sebagai manusia yang pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial bermoral yang telah diilhami secara mendasar oleh Allah SWT.

Pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga.<sup>7</sup>

Di dalam kasus judul adanya Akad Pernikahan yang terjadi secara bersamaan ini berawal dari adanya kawin lari yang biasa dilakukan Adat

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 517

<sup>7</sup>Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 14

Lampung yang biasa disebut dengan “Larian” yang dilakukan oleh laki-laki tersebut dengan seorang perempuan yang berasal dari suku Lampung di karenakan suka sama suka, namun setelah perempuan tersebut dilarikan di tengah jalan sebelum akad nikah terjadi permasalahan datangnya perempuan lain yang mengaku sebagai kekasihnya yang meminta sebuah pertanggung jawaban karena Hamil diluar nikah dengan laki-laki tersebut. Dengan adanya unsur *piil* di dalam Adat Lampung, tidak terlepas dari itu, pada hari H pernikahan terjadilah dua akad nikah sekaligus dalam satu resepsi pernikahan, Ijab yang pertama dilakukan pada tanggal 09 November 2013 dengan perempuan yang sudah dilarikan dan pada waktu yang sama Ijab kedua dilakukan oleh perempuan yang meminta pertanggung jawabannya tersebut.<sup>8</sup> Dalam Kasus ini dapat dikaitkan dengan adanya unsur poligami, perkawinan poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita<sup>9</sup>, karena diperbolehkan seorang laki-laki yang menikahi wanita lebih dari satu. Terlebih dapat dikaitkan dengan kasus ini dengan adanya akad nikah yang terjadi secara bersamaan dalam satu hari sekaligus dalam satu acara resepsi pernikahan di daerah Margorejo-Lampung Utara.

Maka dari kondisi inilah penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam tentang adanya beberapa akad nikah yang terjadi secara bersamaan yang di tinjau dari hukum Islam dengan judul “Akad Nikah yang Terjadi Secara Bersamaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara-Lampung Utara)”.

---

<sup>8</sup>Observasi , 22 Agustus 2019 Desa Margorejo Kotabumi Utara

<sup>9</sup>P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana,, (Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014, h. 35

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan yang nantinya akan tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini berfokus pada bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai akad nikah yang terjadi secara bersamaan.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan maka dapat merumuskan permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu :

1. Bagaimana proses penyebab terjadinya akad nikah secara bersamaan di Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara-Lampung Utara?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai adanya akad pernikahan yang terjadi secara bersamaan?

#### **F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat memberi arah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad nikah yang terjadi secara bersamaan dalam satu resepsi pernikahan Adat Lampung yang ada di Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara-Lampung Utara.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai di terhadap adanya akad nikah yang terjadi secara bersamaan di Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara-Lampung Utara.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta sarjana Fakultas Syariah, khususnya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah tentang Akad Nikah yang terjadi secara bersamaan dalam prespektif hukum Islam.

### b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya akad nikah yang terjadi secara bersamaan yang terjadi di Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara-Lampung Utara.
- 2) Penelitian yang di maksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## G. Manfaat Penelitian

Penulis berharap skripsi ini dapat menyajikan data-data yang kongkrit di lapangan langsung, maka penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis:

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan edukasi dan wawasan yang luas atau pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan

serta memberikan kontribusi keilmuan dan sumbangan ide, pemikiran untuk penelitian selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini untuk mengetahui secara detail dan jelas memberikan pengetahuan bagaimana proses akad nikah yang terjadi secaraan bersamaan yang ada di Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara-Lampung Utara.

## **H. Metode Penelitian**

Penggunaan suatu metode adalah keharusan dalam sebuah penelitian agar validitas data bisa dicapai. Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Namun sebelum memaparkan ketiga metode tersebut, penelitian akan menguraikan terlebih dahulu tentang jenis dan sifat penelitian.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>10</sup>

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel dan referensi lainnya.

---

<sup>10</sup>Kartini Kartono, *Pengantar metodologi Riset Sosia*, Cetakan VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 81.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>11</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Terdapat sumber data penelitian, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang paling utama, yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan, bahan hukum primer penulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist dan wawancara melalui beberapa narasumber yaitu tokoh agama, tokoh adat, aparat desa dan saudaranya.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, dan judul-judul lain yang berkaitan dengan judul yang dimaksud.

## 3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yaitu objek yang akan diteliti.<sup>12</sup> Populasi yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang akan menjadi fokus penelitian. Objek yang diteliti melalui wawancara dengan beberapa orang yang ada di Desa Margorejo seperti melakukan wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, aparat Desa dan Saudara Imam.

---

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 23.

<sup>12</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Rosdakarya, 1995), h. 35



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode :

- a. Metode Observasi, diperlukan untuk melakukan pengamatan secara langsung tentang latar belakang keadaan saat ini dan interaksi lingkungan suatu kelompok social, individu .adapun objek penelitian adalah Masyarakat yang ada di Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara-Lampung Utara.
- b. Metode Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan.<sup>13</sup> yang menjadi responden nya yaitu Masyarakat yang ada di Desa Margorejo, Kotabumi-Lampung Utara.

#### 5. Analisia Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>14</sup>

Metode ini digunakan untuk menganalisa data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan

---

<sup>13</sup>AbdulKadir Muhamma, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

<sup>14</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h.80



penulis digunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Perkawinan dalam Islam

#### 1. Pengertian Akad Perkawinan

Akad perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah “akad nikah”. Secara bahasa akad nikah terdiri dari dua kata, akad dan nikah . Akad adalah perikatan perjanjian, dan permufakatan. Akad nikah sering juga dikatakan dengan istilah ijab kabul. Ijab adalah pernyataan melakukan ikatan (dilakukan oleh wali mempelai wanita atau wakilnya), sedang kabul adalah pernyataan penerimaan ikatan (dilakukan oleh pihak mempelai pria atau yang mewakilkannya).<sup>1</sup>

Dengan demikian pengertian akad nikah atau ijab kabul adalah persetujuan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.

Lafadz ijab kabul yang telah umum digunakan dalam proses ikatan adalah :

*“Ya... (nama mempelai laki-laki) bin (nama bapak mempelai laki-laki), aku nikahkan engkau, atau aku kawin engkau dengan anakku ... (nama mempelai perempuan) binti ... (nama orang tua mempelai perempuan) dengan mas kawin ... tunai”*<sup>2</sup>

Dijawab dengan kalimat kabul :

*“aku terima nikahnya dengan mas kawin ..... tunai”*

Dari keadaan yang demikian itu menunjukkan bahwa keberadaan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan proses ijab kabul mutlak harus jelas.<sup>3</sup>

---

34. <sup>1</sup> Nasruddin, *Fiqih Munakahat*, (Kota Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah,2015), h.

<sup>2</sup> *Ibid*, Nasruddin, *Fiqih Munakahat*, .... h. 34.

<sup>3</sup> *Ibid*, Nasruddin, *Fiqih Munakahat*, .... h. 35.

Kawin dalam Islam dikenal dengan istilah *nikah* atau *tazwij*, secara harfiah adalah:

*“bersenggama atau bercampur”*

Tumbuh-tumbuhan kawin apabila satu dan lainnya saling bertemu dan berkumpul.

Secara syari’i nikah adalah :

*“suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan menggunakan lafadz “nikah” (menikahkan), atau lafadz “tazwij (mengawinkan)”*.<sup>4</sup>

Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti akad, yaitu akad antara calon suami istri untuk memperbolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami istri dan secara *majaz* berarti persetubuhan.

Mempersoalkan definisi nikah, menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Oleh mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafadz) “*inkâh* atau *tazwîj* atau turunan (makna) dari keduanya.”Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad (yang dilakukan dengan

---

<sup>4</sup>*Ibid*, Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, .... h. 4.

menggunakan) kata *inkâh* atau *tazwîj* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).”<sup>5</sup>

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.<sup>6</sup> Pada hakikatnya, maka nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara *majaz* diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafadz nikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an berarti akad, kecuali firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 230 yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”<sup>7</sup> (QS. Al-Baqarah (2): 230)

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.<sup>8</sup> Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang

<sup>5</sup>Lihat Abdur-Rahman Al-Juzairi (selanjutnya disebut Al-Juzairi), *al-Fiqh 'alal-Madzahib al-Arba'ah*, 1411 H/1990 M (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr), jilid. 4, h. 2.

<sup>6</sup>Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th), Juz 2, h. 36.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 36.

<sup>8</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet 1, 1996), h.1.

menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita.<sup>9</sup> Menurut Imam Maliki nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.<sup>10</sup> Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwīj* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa para *fuqaha* mengartikan nikah dengan Akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya.<sup>11</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan, yaitu:

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materi.

<sup>9</sup>*Ibid*, Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, .... h. 2.

<sup>10</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989M).jilid ke IV, h. 1.

<sup>11</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009),h. 246-457.

- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, *mawaddah wa rahmah*.<sup>12</sup> Apapun yang dimaksud dengan sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seiring-sejalan, lunak hati atau lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan atau kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu dan amal shaleh.

Yang dimaksud dengan *mawaddah* adalah kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain.

Yang dimaksud dengan *rahmah*, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.

Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW “Rumahku adalah surgaku insya Allah akan segera terwujud”.

- c. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

---

<sup>12</sup> Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Auliwi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1975), h. 43.

- d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>13</sup>

Sifat mutual ini terdapat dalam:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ  
لَهُنَّ عِلْمٌ مِّنَ اللَّهِ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا  
عَنكُمْ فَالْزَنَ بَشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى  
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ  
إِلَى الْإِلِّ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa” (Q.S. Al-Baqarah (2):187)

<sup>13</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet 1, 1996), h. 26-27.



Keterangan tersebut, diperjelas dalam firman Allah QS. An-nisa'

(4) : 19) yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan, bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-nisa’ (4):19)

Lalu Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan:

أَيْنَمَا أَنْظَرِ أَنْتَ مِنْهُ هُوَ فَإِنَّ جَنَّتِكَ وَنَارِكَ

Artinya: “Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya karena suamimu (merupakan) Surgamu dan Nerakamu.”

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Basam, tujuan pernikahan, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Menjaga kemaluan suami-istri dan membatasi pandangan masing-masing di antara keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain.
- b. Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya, sehingga

<sup>14</sup>H.M.A Tihami dan Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010 ), h. 15.



teralisasi kebangsaan di antara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktifitas kehidupan.

- c. Menjaga nasab, yang dengannya terwujud pengenalan antar sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan perikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
- d. Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri. Setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.
- e. Dalam pernikahan terdapat rahasia Illahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka di antara suami istri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan di antara kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama.
- f. Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat ditangani dan terurus karena bersatunya suami-istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara istri menata rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka. Dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.

### 3. Rukun dan Syarat Akad Perkawinan

Pernikahan dapat dilangsungkan harus memenuhi rukun yang telah ditetapkan oleh kebanyakan ulama fiqh, yakni :

- a. Calon mempelai wanita
- b. Calon mempelai laki-laki
- c. Wali nikah dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. *Sighat* ijab kabul, Ijab dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.<sup>15</sup>

Akad nikah baru sah apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Wali dan calon mempelai pria harus sudah *mumayyiz*.

Apabila salah satu pihak ada yang tidak sehat akalnya (gila) atau masih kecil dan belum *mamayyiz*, maka pernikahannya tidak sah.

- b. Ijab kabul harus dilaksanakan dalam satu majelis.

Antara *sighat* ijab dan *sighat* kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikategorikan dengan tindakan pemisahan antara *sighat* ijab dan *sighat* kabul.

Tenggang waktu sejenak yang secra adat kebiasaan tidak dikatakan terpisah, maka hukum adat nikahnya sah.

- c. Antara *sighat* ijab dan *sighat* kabul harus sejalan.

Apabila antara pernyataan pihak yang mengutarakan ijab bertolak belakang dengan pihak penerima pernyataan ijab sebagai qabul berlawanan, maka akad nikahnya batal.

---

<sup>15</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, h. 61

- d. Ijab dan kabul harus dilaksanakan dengan lisan dan dapat didengar oleh masing-masing pihak, yakni wali, saksi, dan kedua mempelai. Dalam melaksanakan ijab kabul kedua belah pihak berniat bahwa mereka akan melaksanakan ijab kabul. Demikian perlu dikarenakan akad nikah salah satu bentuk tindakan hukum bahkan sangat sakral, sehingga diperlukan adanya tindakan yang tulus dan ketulusan tentunya dapat terwujud dengan baik bila memang diniatkan sesuai dengan apa yang menjadi hajatnya.

Di dalam Buku Karya Abd Shomad yang berjudul *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* mengatakan bahwa Syarat Perkawinan yaitu:

- a. Syarat Mempelai laki-laki

Syarat mempelai laki-laki yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Bukan mahram dari calon istri.
- 2) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri.
- 3) Orang nya tertentu atau jelas orangnya.
- 4) Tidak sedang menjalankan Ihram Haji.

- b. Syarat mempelai wanita, yaitu:

- 1) Tidak ada halangan hukum:
  - a) Tidak bersuami
  - b) Bukan mahram
  - c) Tidak sedang dalam iddah

---

<sup>16</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet. 1, 2010), h. 277

2) Merdeka atas kemauan sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat calon suami dan istri sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
- d) Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI Pasal 71, yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), h. 80.

Sebelum melangsungkan perkawinan, Pegawai Catatan Sipil harus meminta agar kepadanya diperlihatkan:

- (1)akta kelahiran masing-masing calon suami istri;
- (2)akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan didaftarkan dalam daftar izin kawin, atau akta otentik lain yang berisi izin bapak, ibu, kakek, nenek, wali atau wali pengawas, ataupun izin yang diperoleh dan Hakim, dalam hal-hal di mana izin itu diperlukan; Izin itu juga dapat diberikan pada akta perkawinan sendiri;
- (3)dalam hal perkawinan kedua atau perkawinan berikutnya akta perkawinan suami istri yang dulu, atau akta perceraian, atau salinan surat izin dari Hakim yang diberikan dalam hal pihak lain dan suami atau istri tidak ada;
- (4)akta yang menunjukkan adanya perantaraan Pengadilan Negeri;
- (5)akta kematian dan mereka yang seharusnya memberikan izin kawin;
- (6)bukti, bahwa pengumuman perkawinan itu telah berlangsung tanpa pencegahan di tempat yang disyaratkan menurut Pasal 52 dan berikutnya, ataupun bukti bahwa pencegahan yang dilakukan telah dihentikan;
- (7)dispensasi yang telah diberikan;
- (8)izin untuk para perwira dan tentara bawahan yang menjadi syarat untuk melakukan perkawinan.

Adapun dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persyaratan calon mempelai, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang meninggal dunia

<sup>18</sup> *Ibid*, Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, .... h. 81

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Persada, 1997), h. 222.

atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, ayat (3): “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”, ayat (4) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.

Pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu

mendengar orang-orang tersebut. ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

- 2) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang dari kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) yaitu:

“Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.”

dan (4) “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.”

Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) yaitu: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) yaitu: “Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. “

3) Perkawinan dilarang antara dua orang yang:<sup>20</sup>

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak atau ibu tiri.
- d) Berhubungan susuan, yaitu oran tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e) Berhubungan suadara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

c. Syarat Wali, yaitu:

Wali harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh

---

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), h.50 .

<sup>21</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet. 1, 2010), h. 278.



- 3) Barakal
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

Persyaratan wali menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, akil, dan baligh.

#### 1) Kedudukan Wali

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakuka oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.<sup>22</sup>

a) Selain itu ada beberapa ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali, diantaranya:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2006), h.69.

kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-baqarah (2) : 232)

Contoh lain adalah firman Allah QS. Al-baqarah (2):221 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَعَبَّكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ  
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-baqarah (2):221)

Lalu dipertegas kembali pada firman Allah, yang menyatakan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-nur (24):32)

## 2) Jenis-jenis Wali

Wali nikah terdiri dari:

- a) Wali nasab
- b) Wali hakim

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

*Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu Ayah, kakek, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

*Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

*Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

*Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.<sup>23</sup>

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat serajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung daripada kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-

---

<sup>23</sup>Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), h. 84.

sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah. Dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>24</sup>

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau boleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah *uzur*, maka hak menjadi wali sudah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.<sup>25</sup>

Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, wali yang mendapat prioritas utama di antara wali-wali yang ada ialah ayah dari pengantin wanita, kemudian kalau tidak ada atau berhalangan barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah-seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki, barulah sesudah itu kerabat-kerabat terdekat (*'ashabah*) yang lain.<sup>26</sup>

### 3) Syarat Saksi

Syarat saksi yaitu sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Berakal

<sup>24</sup>*Ibid.* Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, .... h. 79.

<sup>25</sup>*Ibid.* Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, .... h. 86-87.

<sup>26</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Cv Asy-Syifa, 2003),h. 365.

- d) Dapat mendengar dan melihat
- e) Tidak dipaksa
- f) Tidak sedang melaksanakan ihram
- g) Memahami apa yang digunakan untuk ijab kabul.<sup>27</sup>

Ketentuan saksi dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- b) Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli.
- c) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>28</sup>

#### 4) Syarat Ijab Kabul

Adapun syarat ijab kabul, yaitu:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d) Antara ijab dan kabul bersambung
- e) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah

---

<sup>27</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet. 1, 2010), h. 278.

<sup>28</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), h. 90.

- g) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>29</sup>

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang akad nikah (ijab kabul) adalah sebagai berikut:

- a) Ijab dan kabul antara wali dengan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- b) Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.
- c) Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>30</sup>

#### 4. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya para jumhur *ulama* berkomentar bahwa menikah itu hukumnya *sunnah*.

Golongan Syafi'iyyah berkomentar:

*“Nikah (kawin) hukum asalnya adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila ia*

---

<sup>29</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 63

<sup>30</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2009), h. 84.

*bermaksud untuk menghindari diri dari perbuatan haram, atau memperoleh keturunan, maka hukumnya sunnah”.*

Pendapat ini banyak diikuti kebanyakan dinegeri ini. Sedangkan golongan Zahiri menetapkan hukum wajib. Para ulama Maliki Mutaakhirin berpendapat bahwa menikah dapat dihukum wajib, sunnah atau mubah, demikian ini dengan memperhatikan dampak pernikahan yang terjadi baginya.<sup>31</sup>

Perbedaan dalam menetapkan hukum nikah disebabkan permasalahan nikah yang terdapat dalam *fi'il amr* pada ayat atau hadist apakah diartikan wajib, sunnah atau mubah.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawinkannya), Maka kawinkanlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu milki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tindak berbuat aniaya. (QS. An-nisa (4):3)

Dari ayat diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum asal perkawinan. Menurut sebagian ulama, asal melakukan perkawinan adalah sunnah. Pendapat ini didasarkan kepada Hadis Rasulullah SAW: “....tetapi aku shalat, tidur,

<sup>31</sup>Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Kota Bandar Lampung: CV.TeamMsBarokah, 2015), h.15.



*puasa, berbuka, dan kawin. Sesungguhnya kawin itu sunnahku, barangsiapa tidak menyukai sunnah-Ku, maka dia bukan umat-Ku.”(Muttafaq ‘alaih).*

Bahkan ada di antara pendapat ulama yang mengatakan, bahwa hukum asal melakukan perkawinan itu wajib, seperti pendapat Abu Daud az-Zahiri.<sup>32</sup>

Tetapi menurut pendapat yang paling kuat, asal hukum melakukan perkawinan adalah ibadah atau boleh.

Alasan yang dijadikan dalil oleh mereka adalah:<sup>33</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada kedua-nya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-nisaa’ (4):1)

Kemudian firman Allah menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَتِلْكَ وَرُبِعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢﴾

<sup>32</sup>Sayuti Tahlib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, cet. 5 1986), h. 47

<sup>33</sup>*Ibid*, Sayuti Tahlib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, .... h. 49



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawinkannya), Maka kawinkanlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu milki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tindak berbuat aniaya.” (QS. An-nisaa’ (4):3)

Maka Allah pun menjelaskan dalam firmanNya yang menyatakan bahwa:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ  
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, terkecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikamati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-nisaa’ (4):24)

Berdasarkan kepada perubahan *Illat*-nya, maka hukum nikah dapat beralih menjadi, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya:

a. Hukumnya beralih menjadi sunnah.

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekadar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunnah untuk melakukan perkawinan. Kalau dia kawin dia mendapat pahaal dan kalau dia tidak atau belum kawin, dia tidak mendapat dosan dan juga tidak mendapat pahala.

b. Hukumnya beralih menjadi wajib.

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia kawin akan dapat pahala, baik dia seorang laki-laki maupu perempuan.<sup>34</sup>

Begitu juga menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, bagi orang yang telah mampu kawin, beristeri itu wajib hukumnya. Karena dengan beristri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu.

*Al-Qurtubi* mengatakan: “bagi orang yang telah mampu kawin, sedangkan dia khawatir dirinya terjerumus ke dalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara akibat membujang, yang rasanya hal itu hanya bisa disembuhkan dengan perkawinan, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkawinan dalam kasus seperti ini.”<sup>35</sup>

c. Hukumnya beralih menjadi makruh.

Yaitu seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin. Kalau dia tidak kawin dengan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka dia akan mendapat pahala.

<sup>34</sup>*Ibid*, Sayuti Tahlib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, .... h. 49

<sup>35</sup>Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Asy-Syifa. T.th.), h.359-360

- d. Hukumnya beralih menjadi haram.

Yaitu apabila seseorang laki-laki hendak mengawini seorang wanita dengan maksud menganiayanya atau memperolok-olokannya, maka haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan tersebut.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
- c. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- e. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbât* nikahnya ke Pengadilan Agama.
- g. *Itsbât* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - 2) Hilangnya akta nikah
  - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya satu syarat perkawinan
  - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974
  - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- h. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

#### **5. Hikmah Melakukan Perkawinan**

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas tolong menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.<sup>36</sup> Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'uwaitah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: pustaka al-kautsar, 1998), h. 378.

<sup>37</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: LADANG KATA, 2017), h. 71.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi,<sup>38</sup> sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali, bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suku dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan. Sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah (QS. Al-A'raf (7): 189).

...وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا.....

Artinya: "... Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang (tenang kepadanya)..."

- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.

---

<sup>38</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 256-258; Lihat, Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 65-68.

- f. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.<sup>39</sup>

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan keturunan, serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam.
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan (perbuatan maksiat).
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan duduk-duduk dan bercengkrama antar suami isteri, saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: LADANG KATA, 2017), h. 72.

<sup>40</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 10-12.

<sup>41</sup> Slamet Abidin, dan H. Aminudin: *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999)

- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan, adanya pembagian tugas dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mencukupi keluarga.
- e. Dalam salah satu pernyataan PBB diberikan oleh harian “Nasional” terbitnya Sabtu 6 Juni 1959, sebagaimana dikutip oleh Bukhori, mengatakan:<sup>42</sup> “Bahwa orang yang bersuami istri lebih panjang umurnya, daripada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang”.

## 6. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Secara garis besar larangan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena:<sup>43</sup>

- a. Larangan Perkawinan Karena Pertalian *Nasab*.
- b. Larangan Perkawinan karena hubungan Pertalian Kerabat (Semenda).

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan perkawinan (Semenda)<sup>44</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Ibu istrimu (mertua perempuan), termasuk juga nenek perempuan istri, baik dari garis ibu atau ayah.

<sup>42</sup>M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 7-10.

<sup>43</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: LADANG KATA, 2017), h. 74

<sup>44</sup> Pasal 39 ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam*



- b. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri (anak tiri).
- c. Istri-istri anak kandungmu (menantu), termasuk juga istri cucu.
- d. Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah (ibu tiri) tanpa disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ayah dan ibu.
- e. Larangan Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan. Hubungan sesusuan menjadikan orang mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya. Mereka yang sesusuan ini telah menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan ini, sehingga disebut saudara sesusuan, tetapi pendekatan ke dalam saudara sesusuan, tidak menjadikan hubungan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewarisi.<sup>45</sup>
- f. Larangan pernikahan untuk sementara waktu (*Mahram Ghairu Muabbad*), *Mahram Ghairu Muabbad*, yaitu larangan perkawinan yang berlaku hanya untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan ini tidak berlaku lagi. Larangan kawin untuk sementara itu berlaku dalam hal-hal seperti berikut:
  - 1) Mengawini (menghimpun) dua orang bersaudara dalam satu masa
  - 2) Poligami di luar batas (lebih dari 4 orang), seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak menikahi empat orang, dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya, dan habis pula masa iddahnya.

---

<sup>45</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), h. 53.



Dengan begitu perempuan kelima itu haram selama salah seorang di antara istrinya yang empat itu belum diceraikan.

- 3) Larangan karena Ikatan Perkawinan. Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan, haram dikawani oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya dan selesai masa iddahnya, barulah ia boleh dikawini oleh siapa saja.<sup>46</sup> Sepanjang tidak ada larangan lain yang menentukannya.
- 4) Larangan karena Talak Tiga (*bâ'in kubro*). Perempuan yang ditalak tiga, haram menikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau wanita itu sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin, juga telah diceraikan oleh suami terakhir itu, serta telah habis masa 'iddahnya.
- 5) Larangan karena *Ihram*. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram *umrah* maupun *haji*, tidak boleh dinikahi.
- 6) Larangan karena Musyrik (Beda Agama). Yang dimaksud dengan beda agama adalah perempuan muslimah dengan laki-laki *non muslim* dan sebaliknya. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir.<sup>47</sup>
- 7) Larangan karena waktu *Iddah*, yaitu perempuan yang sedang dalam waktu *iddah* baik 'iddah cerai maupun ditinggal mati.
- 8) Istri yang putus perkawinan karena *li'an*. *Li'an* adalah suami istri yang saling menyatakan bersedia dilaknati oleh Allah setelah masing-

---

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 125-128.

<sup>47</sup> *Ibid*, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, .... h. 544.

masing suami istri mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan sumpah masing-masing, karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung/dilahirkan oleh istrinya sebagai anaknya sendiri, dan pihak istri bersikeras pula menolak tuduhan yang sedang mereka tidak memiliki alat bukti yang diajukan kepada hakim.<sup>48</sup>

## B. Poligami dalam Perkawinan Islam

### 1. Pengertian Poligami

Secara etimologi kata-kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Maka jika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Sedangkan secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.<sup>49</sup>

Dalam kamus hukum, Poligami adalah ikatan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.<sup>50</sup> Berdasarkan hal tersebut, poligami mempunyai dua kemungkinan makna yaitu: *Pertama*, seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan. *Kedua*, seorang perempuan menikah dengan banyak laki-

<sup>48</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: LADANG KATA, 2017), h. 91.

<sup>49</sup> Abd. Rahman Ghazay, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 129.

<sup>50</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 364.

laki. Kemungkinan pertama disebut Poligini<sup>51</sup> dan kemungkinan kedua disebut Poliandri. Hanya saja sejak berkembangnya zaman pengertian ini mengalami perubahan sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki yang memiliki banyak istri, sedangkan poligini sendiri tak lazim digunakan, khususnya di Indonesia.

Dalam hukum Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri.<sup>52</sup> Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat dalam QS. An-Nisa (4): Ayat 3, sebagaimana penetapan dasar hukum poligami.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-nisa' (4):3)

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang menikahi lebih dari seorang wanita pada waktu yang sama, akan tetapi hanya dibatasi sampai empat orang.

<sup>51</sup> Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam: Monogami atau Poligami*, (Yogyakarta: An Naba', 2007), h. 20.

<sup>52</sup> Khoirudin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 84.

## 2. Dasar Hukum Poligami

Hukum poligami dalam Islam adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang mengkhawatirkan itu, dilanjutkan atau direkomendasikan agar mencukupkan beristri satu orang saja.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami.<sup>53</sup>

Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami.

Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusny Nabi Muhamammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristrikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena istri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 3:

---

<sup>53</sup>Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 357.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
 وَثُلُثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawaininya), Maka kawinkanlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-nisa’ (4):3)

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri hanya empat istri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Menurut Hamka untuk memahami persoalan kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang istri (poligami), harus dilihat *munasabah*-nya dengan ayat sebelumnya, yakni Q.S. An-Nisa’ (4): 2, penegasan tentang diperbolehkannya beristri lebih dari seorang sampai empat, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), ...”maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat...”. Dengan demikian pangkal ayat dua tentang pemeliharaan anak yatim bertemu dengan kebolehan untuk beristri lebih dari satu sampai empat.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Abdul Qodir Zaelani, “Persyaratan Adil dalam Poligami Ditinjau dari Perspektif Filosofis, Yuridis-Normatif, Psikologis dan Sosiologis”. *Jurnal Al-‘adalah fi qadhiyah*, Vol. XIII No. 4 (Desember 2015).

Menurut tafsir Aisyah r.a, ayat ini karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi SAW, tentang ayat tersebut. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.”<sup>55</sup>

### 3. Alasan dan Syarat Poligami

Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyari’atkan oleh Islam maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapa alasan yaitu:

- a. Jumlah istri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita, Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

<sup>55</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),h. 359.



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

(QS. An-nisa' (4):3)

- b. Syarat selanjutnya adalah sanggup berbuat adil kepada para istri, berbuat adil kepada para istri dalam poligami adalah masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah.
- c. Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan istrinya baik susuan maupun nasap, karena dilarang mengumpulkan istri dengan saudaranya atau dengan bibinya, larangan ini terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah

kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-nisa' (4):23).

- d. Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertambahnya istri, maksudnya bagi seorang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu, jika belum mampu haruslah menahan dulu (puasa)
- e. Persetujuan dari istri, hal ini sesuai dengan posisi suami dan istri dianggap satu kesatuan dalam keluarga. Apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izin kepada istri, apalagi masalah ingin beristri lagi.<sup>56</sup>

Alasan-alasan kebolehan poligami terdapat dalam pasal 4 UU Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
  - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>56</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 164.

Berkenaan Pasal 4 diatas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter). *Ketiga*, tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>57</sup>

Berdasarkan pasal di atas, UU Perkawinan membolehkan poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelaslah bahwa asas yang dianut oleh UU Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami diletakkan pada status hukum darurat (*emergency*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Disamping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).<sup>58</sup>

Sedangkan kondisi-kondisi yang memperbolehkan poligami menurut Al-Maragi adalah:

- a. Bila suami beristrikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan
- b. Bila istri sudah tua dan mencapai umur monopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang istri.
- c. Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinahan karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami).

---

<sup>57</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 163.

<sup>58</sup>Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975), h. 25-26.

- d. Bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaa yang mencolok.<sup>59</sup>

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59 yaitu:<sup>60</sup>

**Pasal 55:**

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu..

**Pasal 56:**

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin istri Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum

**Pasal 57:**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

**Pasal 58:**

- a. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maak untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 yaitu:
  - 1) Adanya persetujuan istri
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anaknya.
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama.
- c. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai pesetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau

<sup>59</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Dar Al-Fikr, Beirut, hlm. 181

<sup>60</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009),h. 124

apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya, sekurang-sekurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat peniaian hakim.

**Pasal 59:**

Dalam hal ini istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristri lebih dari seorang berdarakan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami mengajukan banding atau kasasi.<sup>61</sup>

#### 4. Hikmah Poligami

Hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami diantaranya adalah:

- a. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia untuk kemakmuran dan kemaslahatan.
- b. Memperbesar jumlah ummat.
- c. Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka.
- d. Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita berlebih dibandingkan pria.<sup>62</sup>

Adapun hikmah lainnya adalah:

- a. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.
- b. Islam, sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum muslim untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia, mereka tidak akan sanggup memikul tugas, bukanlah pepatah mengatakan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau dengan berpoligami.

---

<sup>61</sup>Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani) cet ke-3, 1989, h. 127.

<sup>62</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 166.

c. Negera merupakan pendukung agama, seringkali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memperhatikan janda-janda dan tidak ada jalan yang baik untuk mengurus janda-janda ini terkecuali dengan menikahi mereka, disamping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya ada dilakukan dengan memperbanyak keturunan.<sup>63</sup>

### C. Perkawinan yang Tidak Tercatat

#### 1. Pengertian Perkawinan Tidak Tercatat.

Nikah tidak tercatat atau talak tanpa Pengadilan Agama dianggap sah secara agama Islam, namun hukum positif yang berlaku justru dipandang tidak sah. Dualisme hukum di Indonesia yang aturannya saling bertentangan, terkait pernikahan dan talak merupakan hal yang bermasalah. Salah satu penyebab terjadinya dualisme adalah di Indonesia ada dua kelompok '*madzhab*' (yang mendukung sepenuhnya atau mengikuti ajaran Islam total, dan yang mendukung atau mengikuti hukum positif). Supaya terjadi sinkronisasi, maka dipakailah keduanya, sebab bagi negara seperti Indonesia yang berdasarkan hukum yang dibuat berdasarkan persetujuan rakyat, tentulah sebagai warga yang baik kita harus mengikutinya.<sup>64</sup>

Nikah tidak tercatat dalam fiqh kontemporer dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan

---

<sup>63</sup>Tihami dan Sohrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 357.

<sup>64</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: LADANG KATA, 2017), h. 201.



tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan.<sup>65</sup> Disebut nikah *'urfi* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Saw dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka, tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.<sup>66</sup>

Dalam hukum Islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain.<sup>67</sup> Perkawinan adalah *misaqan galizan*, atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Al-qur'an dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali.<sup>68</sup>

Menurut hukum Islam, bahwa tujuan syari'at Islam (*maqasidus syari'ah*) adalah mendatangkan maslahat dan menghindarkan bahaya, karena perkawinan yang tidak dicatat pemerintah menimbulkan *mudarat* kepada istri, anak, dan harta bersama (gono gini), maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut sebagian orang dapat dipandang

---

<sup>65</sup>Majallah *al-Buhus al-Fiqhiyyah*, edisi 36, Th. 9/ Rajab-Sya'ban-Ramadhan 1428 H. h.194.

<sup>66</sup> Azmi Mamduh, *Al-'Aqdu Al-'Urf*, hal. 11, dan Usmah al-Asyqor, *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qodhaya Zawaj wa Tholaq*, h. 130.

<sup>67</sup>Syukri Fathudin A W, Vita Fitria, *Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*. Dalam [http://www/. Google.com](http://www.Google.com). Akses 25 November 2013, yang mengutip dari Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (1994) Yogyakarta, Tiara Wacana, h. 46.

<sup>68</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1996, h. 18.

sebagai masalah *darurat* karena tidak disebutkan secara rinci dalam Al-qur'an dan Hadis.<sup>69</sup>

Terkait masalah status hukum perkawinan tidak tercatat (dibawah tangan/ nikah Sirri), sebagaian menilai bahwa nikah dibawah tangan adalah sah secara agama sementara secara kenegaraan tidak sah. Dalam hal ini penulis tidak ingin larut dalam kontradiksi tersebut, tidak ingin mengklaim sah dan tidaknya nikah. Penulis hanya ingin memfokuskan bagaimana pernikahan dibawah tangan yang banyak dilakukan masyarakat atau yang tidak tercatat di KUA sebagai lembaga resmi pemerintah pencatat nikah, tidak menimbulkan implikasi bagi pelaku dan keturunannya.<sup>70</sup> Jadi Nikah Sirri yang dimaksud adalah nikah yang tidak terdaftar secara resmi di lembaga perkawinan. Bukan pernikahan yang dirahasiakan sebagaimana terambil dari kata "*sirriun*" dalam bahasa Arab yang berarti rahasia.<sup>71</sup>

## 2. Mudarat Nikah Tidak Tercatat

Banyak problem hukum yang dijumpai bagi pasangan suami istri dan anaknya akibat dari perkawinan tidak tercatat, dan mereka mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan. Perkara isbat nikah ini, dapat diklarikasikan masalahnya sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Suami istri yang telah menikah di bawah tangan, tidak mempunyai akte nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan

---

<sup>69</sup>Hazaemah Tahido Yanggo, *Perkawinan Yang tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta GT2 dan GG Pas, h. 22.

<sup>70</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: LADANG KATA, 2017), h. 213.

<sup>71</sup>*Ibid*, Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, .... h. 213.

<sup>72</sup>*Ibid*, Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, .... h. 216.

negara. Akibatnya anak-anak tidak dapat memperoleh Akte Kelahiran dari instansi yang berwenang, karena untuk mendapatkan akte kelahiran itu diperlukan akte nikah dari orang tuanya.<sup>73</sup>

- b. Suami istri yang melangsungkan pernikahan sesudah tahun 1974 tidak mengetahui kalau pernikahannya tidak tercatat, karena mereka merasa dinikahkan oleh penghulu resmi dan membayar sejumlah biaya pernikahan, namun pada saat memerlukan buku nikah sebagai syarat untuk berangkat haji atau mengurus pensiun atau pembuatan akte kelahiran anak, baru diketahui ternyata perkawinan mereka tidak tercatat di KUA setempat, kemudian kedua suami istri mengajukan isbat nikah.<sup>74</sup>
- c. Suami istri secara sirri, kemudian terjadi sengketa perkawinan, suami mengajukan permohonan isbat nikah untuk bercerai dan adapula istri (Penggugat) yang mengajukan isbat nikah untuk bercerai karena telah ditinggal pergi oleh suaminya, guna memperoleh kepastian hukum status dirinya sebagai janda.
- d. Seorang wanita yang tanpa sadar senang kepada seseorang laki-laki beristri dan menikah dengan laki-laki tersebut tanpa adanya pendaftaran ke KUA. Beberapa bulan berselang, istri (pertama) laki-laki tersebut mendatangi istri baru suaminya, selanjutnya suami beristri dua tersebut menghilang dan tidak kembali lagi ke rumah istri barunya. Setelah sekian lama tidak melaksanakan kewajiban lahir batinnya, wanita tersebut mengajukan permohonan isbat untuk bercerai, tetapi:

---

<sup>73</sup>Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan Harta*, Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007, h. 38.

<sup>74</sup>T a r s i, (Ketua Pengadilan Agama Pelaihari) *Problematika Nikah di bawah tangan kaitannya dengan Pengesahan Nikah*, [www.pa.plaihari.go.id/index.php?content=mod-artikel](http://www.pa.plaihari.go.id/index.php?content=mod-artikel), Akses 24 November 2013.

- 1) Tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah,
- 2) Perkawinannya sesudah UU Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan,
- 3) Perkawinannya merupakan perkawinan kedua bagi laki-laki beristri.<sup>75</sup>

### 3. Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Sirri

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri adalah:

- a. Nikah sirri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak.
- b. Nikah sirri dilakukan karena adanya hubungan terlarang (perselingkuhan atau hamil diluar nikah). Status perkawinan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1,2, dan 3 yaitu:
  - 1) Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya,
  - 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya,
  - 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>76</sup>
- c. Nikah sirri dilakukan dengan alasan terasa belum lengkap karena sudah bertahun-tahun belum punya anak.
- d. Nikah sirri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Kekhawatiran tersebut dialami oleh pasangan mahasiswa dll yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah. Sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan gejala cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran

<sup>75</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: LADANG KATA, 2017), h. 217.

<sup>76</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2, 3, cet. Ke. 6, (Bandung: CV. Nuansa Aulis, 2015), h. 15.

terjadinya zina. Nikah sirri dilakukan karena merasa belum siap secara materi dan secara sosial.

- e. Nikah sirri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi *muallaf* (baru beragama Islam) untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.<sup>77</sup>

Nikah sirri atau talak tanpa Pengadilan dianggap secara agama Islam, namun menurut hukum positif yang berlaku justru dipandang tidak sah.<sup>78</sup>

#### **D. Hukum Perkawinan pada Adat Lampung**

Dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.<sup>79</sup> Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.<sup>80</sup>

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.<sup>81</sup>

Tata cara dan upacara adat Lampung pada umumnya berdasarkan perkawinan jujur. Tata cara dan upacara adat ini dapat dilakukan apabila

<sup>77</sup> *Ibid*, Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, .... h. 223.

<sup>78</sup> Khoirul Abror, "Wacana tentang nikah sirri dalam fikih kontemporer". *Jurnal Al-'adalah fi qadhiyah*, Vol. IX No. 1 (2017).

<sup>79</sup> Zuhraini, *Serba-Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2017), h. 49

<sup>80</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1977), h. 23.

<sup>81</sup> *Ibid*, Zuhraini, *Serba-Serbi Hukum Adat*, .... h. 50.

tercapai kesepakatan antara pihak kerabat pria dan wanita, baik dikarenakan berlakunya rasan sanak, maupun karena rasan tuha, jadi baik terjadinya perundingan antara orang-orang tua setelah terjadinya berlarian, maupun terjadinya perundingan dikarenakan adanya peminangan.<sup>82</sup>

Di dalam masyarakat adat Lampung dibedakan antara masyarakat adat beradat *Pepadun* dan masyarakat adat *Sebatin*. Masyarakat adat pepadun dalam hal upacara dan tata cara perkawinan pada prinsipnya memakai bentuk perkawinan jujur, yang dilaksanakan melalui upacara seperti *Hibal serba*, *Bumbang Aji*, *Tar Padang* dan *Cakak Manuk* dan *Sebambangan*.<sup>83</sup>

*Sebambangan* sering kali disalah artikan dengan istilah *Kawin Lari*, sehingga citra adat Lampung ini menjadi kurang baik dimata masyarakat diluar suku Lampung yang jelas kurang memahami makna sesungguhnya dari adat *Sebambangan*. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat asli Lampung, budaya yang sudah mengakar sejak jaman nenek moyang Pepadun dan Saibatin. Kendati demikian *sebambangan* ini pun akan berujung pernikahan sebagaimana biasa jika kedua pihak keluarga menyetujuinya. Pihak laki-laki juga tetap memberikan mahar atau pemberian kepada pihak perempuan.

Tata cara adat berlarian sampai dengan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. *Tengepik* artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda pemberitahuan kepada sigadis. Seorang gadis yang melakukan berlarian, biasanya meninggalkan tanda *tengepik*, yaitu berupa surat dan sejumlah uang. Setelah

---

<sup>82</sup> *Ibid*, Zuhraini, *Serba-Serbi Hukum Adat* , .... h. 60.

<sup>83</sup> *Ibid*, Zuhraini, *Serba-Serbi Hukum Adat* , .... h. 61.



gadis sampai ditempat keluarga pemuda, maka orang tua atau keluarga bujang segera melaporkan kepada penyalang. Penyalang segera mengadakan musyawarah menyanak untuk menunjuk utusan yang akan menyampaikan kesalahan kepada gadis tersebut “*Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah*”.

2. *Pengunduran Senjato* atau *Tali Pengunduran* atau juga disebut *Penganttak Salah* adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan dengan membawa senjata (keris) adat dan menyampaikan kepada kepala adat pihak gadis. *Ngattak Pengunduran Senjato* ini harus dilakukan dalam waktu 1x24 jam (bila jarak dekat) dan 3x24 jam dalam jarak jauh atau di luar kota. *Pengunduran Senjato* harus diterima oleh kepala adat gadis dan segera memberitahukan keluarga gadis serta *menyenak wareinya*, bahwa anak gadisnya telah berada di tangan kepala adat pihak bujang. Senjata punduk atau keris ditinggalkan di tempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. *Bepadu* atau *Bebalah*, biasanya setelah *pengunduran senjato* disampaikan, beberapa orang penyalang dan kerabat pihak bujang datang kepada pihak keluarga gadis atau penyalangnya dengan membawa bahan-bahan makanan dan minuman atau mungkin hewan untuk dipotong atau disembelih. Apabila didapat berita bahwa pihak gadis bersedia menerima, pihak bujang untuk segera mungkin mengirim utusan tua-tua adat pihak bujang untuk menyatakan permintaan maaf dan memohon perundingan

guna mencapai kemufakatan antara kedua belah pihak serta agar seimbangan dapat diselesaikan dengan baik menuju kearah perkawinan. Dalam perundingan itu biasanya pihak keluarga gadis mengajukan syarat-syarat perundingan, misalnya pihak keluarga gadis meminta agar dipenuhi jujur atau sereh pembayaran atau penurunan denda dan biaya-biaya lainnya.

4. *Manjau Mengiyan* dan *Sujut*, dari pertemuan yang diadakan kedua belah pihak, maka apabila tidak ada halangan akan diadakan acara *Manjau Mengiyan* (kunjungan menantu pria), dimana calon mempelai pria diantar oleh beberapa anggota penyimbang dan beberapa orang anggota keluarga lainnya untuk memperkenalkan diri kepada orang tua gadis dan penyimbang. Kemudian diadakan acara “*Sujut*” (sungkem) yaitu sungkem kepada semua penyimbang tua-tua adat dan kerabat gadis yang hadir. Biasanya dalam acara ini dilakukan pemberian amai-adek / gelar oleh para ibu-ibu (*bubbai*) dari pihak keluarga gadis.

5. *Peggadew Rasan* dan *Cuak Mengan*, yaitu mengakhiri pekerjaan, melaksanakan acara akad nikah dan *Cuak Mengan* (mengaundang makan bersama), dimana pada hari yang telah ditentukan diadakan acara akad nikah kedua mempelai dan pihak keluarga bujang mengundang para penyimbang, semua menyanak warei serta para undangan lainnya baik dari pihak keluarga gadis, untuk makan bersama sekaligus sebagai pemberitahuan bahwa telah terjadinya pernikahan. Pada saat yang sama pihak keluarga gadis menyampaikan atau menyerahkan barang-barang bawaan atau sesan mempelai wanita. Namun ada kemungkinan dikarenakan

ada permintaan dari pihak gadis, maka acara menjaid besar, dimana mempelai wanita “*dimuleikan*” artinya diambil kembali oleh pihak orang tuanya untuk melaksanakan acara *Hibal Serbo* atau *Bumbang Aji*.<sup>84</sup>

Dalam hal ini ada keterkaitannya seorang laki-laki yang menikahi wanita dengan proses adat Pepadun untuk wanita yang pertama namun tidak dilakukannya proses adat untuk wanita yang kedua.

### E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan penggalian informasi yang diperlukan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa refensi dari berbagai skripsi yang menunjang penelitian ini, dan terdapat perbedaan dengan skripsi-skripsi terdahulu.

Adapun karya penelitian yang keterkaitan dengan masalah Akad Nikah yang Terjadi Secara Bersamaan dalam Perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah dibawah Tangan”.<sup>85</sup> Jadi Achmad Nurseha berfokus terhadap perkawinan (nikah) menurut hukum Islam disamping harus memenuhi rukun dan syarat-syarat materiil juga harus didaftarkan dengan *katibun bi adli* (penulis yang adil diantara kamu), yang dalam hubunga ini petugas pendaftaran nikah,

<sup>84</sup> Sabaruddin Sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013),h. 67-74.

<sup>85</sup> Achmad Nurseha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah dibawah Tangan*”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2015.

talak dan rujuk dalam Islam menurut UU No. 22 tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1954 yaitu Pegawai Pencatat Nikah, penghulu atau *qadhi*. Pasangan nikah bawah tangan terungkap bahwa faktor-faktor yang menyebabkan melakukan nikah bawah tangan adalah mahalanya biaya perkawinan, kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu, *Pertama*, tujuan bersifat normatif, merupakan keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah. *Kedua*, tujuan yang bersifat psikologis yakni untuk memperoleh ketenangan atau ketentraman jiwa. *Ketiga*, tujuan yang bersifat biologis yaitu untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual. *Keempat*, tujuan yang bersifat sosial ekonomis, tercermin dari keinginan mereka merahasiakan pernikahannya.

2. Skripsi karya dari Siah Khosyi'ah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2015 dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat terhadap istri dan anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia”.<sup>86</sup> Siah Khosyi'ah berfokus terhadap Hukum Postif yang ada di Indonesia. Perkawinan bukan semata-mata mengikat hubungan antara satu orang laki-laki dan perempuan, tapi menimbulkan konsekuensi yang luas tidak hanya pada pelaku pernikahan tersebut melainkan juga anak-anak akibat perkawinan, keluarga, masyarakat dan negara. Dengan demikian, pernikahan tidak dianggap selesai dengan

---

<sup>86</sup>Siah Khosyi'ah, “*Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat terhadap istri dan anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia*”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Bandung, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2015.

hanya terjadinya akad nikah, itu sejalan dengan perubahan dan perkembangan hukum Islam dalam format perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia khususnya dan di dunia muslim pada umumnya, maka pencaatan perkawinan merupakan pembaharuan hukum Islam demi tertibnya administrasi keluarga dan kependudukan, hal ini penting karena hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'ah dan dipandang sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam.

3. Skripsi karya dari Irfan Islami, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta dengan judul “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya”.<sup>87</sup> Irfan Islami berfokus kepada faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri, diantaranya adalah faktor ikatan dinas atau kerja atau sekolah, faktor belum cukup umur, faktor hamil diluar nikah sebagai efek pergaulan bebas, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, faktor sosial dan faktor ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas.

---

<sup>87</sup>Irfan Islami , “*Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*”, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta.

## B. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian di Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara-Lampung Utara tentang Akad Nikah yang Terjadi Secara Bersamaan dalam Perpektif Hukum Islam, peneliti mempunyai rekomendasi kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Untuk masyarakat Desa Margorejo khususnya Kepada pemuda-pemudi yang ada di Desa Margorejo untuk menjaga pergaulan dan tetap mempertahankan tradisi adat yang ada dengan norma dan hukum adat yang berlaku serta tidak terlepas dengan ajaran Islam yang baik dan benar.
2. Kepada suami diharapkan bagi suami harus menjadi pemimpin yang baik agar menjadi contoh untuk keluarganya khususnya untuk anak-anaknya.
3. Kepada istri pertama yang pernah di poligami agar lebih sabar dan taat kepada suami serta dapat memaafkan kesalahan suaminya dimasalalu karena suami sudah menceraikan istri keduanya. Agar suami tidak melakukan hal yang serupa dikemudian hari.
4. Kepada mantan istri kedua yang pernah meminta pertanggung jawaban kepada suami agar lebih berlapang dada, merubah sikap dan menyesali perbuatannya dimasalalu.
5. Kepada Tokoh Agama dan Kepala Desa agar memberikan perhatian dan penyuluhan kepada masyarat setempat, supaya tidak terjadi lagi kasus yang serupa.
6. Kepada Masyarakat agar dapat mendukung, mendengarkan dan menerima saran-saran yang baik serta menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat karena dengan ilmu yang di amalakan maka hidup akan menjadi rukun dan sejahtera baik dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan kehidupan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdurrahman I.Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Reneka Cipta, 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminuddi, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al Jamal, Muhammad Ibrahim, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 2003.
- Al Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib Al arba'ah*, Juz IV, Mesir, Daar Al Fikr: 1969.
- Ali Zainudin Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Grafi k Grafika, 2011.
- Alwiyah, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1987.
- Ayyub Hasan, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka AL-Kausar, 2008.
- Arso Sosroarmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Aso Sentana, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2006.
- Desy Anwae, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2003.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama. Semarang, Cit. I, 1993.
- Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Cv Penerbit J-Art.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 4*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewani romli, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampug: Nur Utoya Jaya, 2009.
- Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan Harta*, Jakarta: GT2 dan GG Pas, 2007.

Ghozali Rahman Abdul, *Fiqih Munakahat*, Cet. IV, Ed. I, Jakarta: Kencana, 2003.

*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia.

Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012.

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: LADANG KATA, 2017.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Tesis dan Disertasi, Rineka Cipta, 1996.

Nasution Khoirudin, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Permikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nasruddin, *Fiqih Munaqahat*, Cet. I, Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015.

Narbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Ramulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rafi Baihaqi, Ahmad, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Mediah press, 2006.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001.

Sabaruddin Sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin*, Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan. Moh Thalib, *Fikih Sunnah*, Bandung: al Ma'rif, 1983.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kuwait, Daar Al Bayan: 1971.

Shomad Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Tahlib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5 Jakarta: UI Press, 1986.

Tihami H.M.A dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Al-Kautsar, 1998.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975.

Zuhraini, *Serba-Serbi Hukum Adat*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2017.

**Jurnal :**

Abdul Qodir Zaelani, “*Persyaratan Adil dalam Poligami Ditinjau dari Perspektif Filosofis, Yuridis-Normatif, Psikologis dan Sosiologis*”. Jurnal Al-‘adalah fi qadhiyah, Vol. XIII No. 4, Desember 2015.

Khoirul Abror, “*Wacana tentang nikah sirri dalam fikih kontemporer*”. Jurnal Al ‘adalah fi qadhiyah, Vol. IX No. 1 (2017).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Skripsi :**

Achmad Nurseha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah dibawah Tangan*”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2015.

Siah Khosyi'ah, “*Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat terhadap istri dan anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia*”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Bandung, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2015.

Irfan Islami , “*Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*”, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta.

**Wawancara :**

Sumber : Data Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.

Hasil wawancara, Bapak Andi, Selaku Aparat Desa, Desa Margorejo, Lampung 21 Februari 2020.

Hasil wawancara, Bapak Ahmad Ridwan, Selaku Tokoh Agama, Desa Margorejo, Lampung 21 Februari 2020.

Hasil wawancara, Bapak Toni, Selaku Saudara Imam Antoni, Desa Margorejo, Lampung 21 Februari 2020.

Hasil wawancara, Bapak Warham, Selaku Tokoh Adat, Desa Margorejo, Lampung 21 Februari 2020.

